

INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi pada Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)

Mega Senja Selfia¹, Afifuddin², Retno Wulan Sekarsari³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email : Selfiamega0@gmail.com*

ABSTRAK

Kabupaten Bojonegoro telah menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan kebijakan Open Government Partnership (OGP) bahkan hingga ketingkat desa. Salah satunya adalah Desa Pejambon. Ada tiga permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Pertama, tentang apa saja inovasi dari kebijakan OGP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pejambon. Kedua, bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur setelah adanya kebijakan OGP. Ketiga, pengaruh dari inovasi kebijakan OGP terhadap Desa Pejambon. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis inovasi dari kebijakan Open Government Partnership (OGP) dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakatnya serta pengaruh inovasi bagi Desa Pejambon. Teori yang digunakan adalah teori inovasi menurut Rogers dalam buku Suwarno yang berkaitan dengan karakteristik inovasi kebijakan dan teori partisipasi menurut Yadav. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Analisis Data yang digunakan adalah model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi-inovasi dari kebijakan OGP, sudah memenuhi atribut inovasi menurut Rogers yaitu aspek keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemampuan diujicobakan, dan kemudahan diamati. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan masyarakat Desa Pejambon yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan pembangunan, dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi pembangunan. Pengaruh OGP terhadap Desa Pejambon untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah cukup baik dan juga banyak infrastruktur yang berhasil dibangun. Inovasi Kebijakan Open Government Partnership (OGP) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejambon telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun begitu, Pemerintah Desa masih perlu melakukan sosialisasi terkait kebijakan Open Government Partnership (OGP) kepada masyarakat serta melibatkan lebih banyak komunitas masyarakat di Desa Pejambon untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Kata kunci : Inovasi, Open Government Partnership (OGP), Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur

Pendahuluan

Open Government merupakan pemerintah yang cerdas dalam menyelesaikan masalah dan melayani masyarakatnya. Motivasi itulah yang mendorong Pemerintah Indonesia bergabung dan menjadi salah satu perintis gerakan global Open Government Partnership (OGP) yang telah diluncurkan pada bulan September 2011. Open Government Partnership (OGP) merupakan inisiatif dari beberapa negara yang mempunyai tujuan mewujudkan komitmen dari pemerintah kepada warganya untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan masyarakat, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat sistem pemerintahan secara global. Diawali oleh sekelompok pemerintah dan pemimpin

masyarakat sipil yang menyadari bahwa banyak orang menuntut pemerintahan haruslah transparan dan akuntabel maka terbentuklah gerakan Open Government Partnership (OGP). Indonesia merupakan salah satu negara anggota dalam gerakan Open Government Partnership (OGP) ini. Pada 20 September 2011, Open Government Partnership (OGP) secara resmi diluncurkan oleh 8 negara pendiri diantaranya Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat yang menyetujui Deklarasi Pemerintahan Terbuka, dan mengumumkan rencana aksi masing-masing negara.

Dari tahun ke-tahun, jumlah negara anggota Open Government Partnership terus bertambah pada tahun 2014 jumlah negara anggota Open

Government Partnership (OGP) adalah 64 Negara, pada tahun 2016 berjumlah 75 Negara dan pada tahun 2019 berjumlah 79 negara. Pada tahun 2016 akhir, OGP ditingkat internasional membangun gagasan baru yaitu penerapan OGP ditingkat subnational/daerah. Ada lima *Pilot Project Open Government Partnership* atau daerah percontohan pemerintah terbuka diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung Dan Kabupaten Bojonegoro. Dalam ajang *Pilot Project* ini, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan banyak perhatian atas pelaksanaan pemerintah terbuka yang telah berhasil diterapkan pada pemerintahannya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu instansi pemerintahan di Indonesia yang terdepan dalam menerapkan gerakan Open Government Partnership (OGP) dibandingkan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Kang Yoto-Kang Hartono, telah berhasil menerapkan Open Government atau pemerintah terbuka. Dikatakan demikian karena dari semua daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi *pilot project* atau percontohan pemerintah terbuka Open Government Partnership (OGP) dunia dan menjadi satu-satunya daerah yang berhasil mewakili Indonesia dalam ajang tersebut. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menerapkan Open Government Partnership (OGP) diseluruh wilayah Bojonegoro tepatnya di 430 desa, tetapi sejauh ini baru beberapa desa saja yang sudah menerapkan sistem tersebut. Salah satunya adalah Desa Pejambon.

Desa Pejambon merupakan salah satu desa yang memiliki luas wilayah 189.190 Ha dan jumlah penduduk sekitar 2126 jiwa. Sejak tahun 2016 akhir, Desa Pejambon telah menerapkan Open Government Partnership (OGP). Dengan adanya Open Government Partnership (OGP), pemerintah desa berharap bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa terutama infrastrukturnya. Pembangunan infrastruktur yang memadai adalah suatu hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih banyaknya jalan-jalan yang tidak layak pakai atau rusak serta tidak tersedianya fasilitas infrastruktur lainnya seperti irigasi, drainase, gedung posyandu, gedung sekolah mendorong pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa aspek yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Pejambon tentang inovasi kebijakan Open Government Partnership

2. Masih banyak masyarakat Desa Pejambon yang tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa
3. Partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan desa merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tercapainya pembangunan.
4. Pemerintah Desa Pejambon masih kesulitan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa khususnya infrastruktur

Rumusan Masalah

1. Apa saja inovasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Open Government Partnership (OGP) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Pejambon terhadap pembangunan infrastruktur desa setelah adanya kebijakan Open Government Partnership (OGP) ?
3. Bagaimana pengaruh dari adanya Inovasi Kebijakan Open Government Partnership (OGP) terhadap Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Inovasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Open Government Partnership (OGP) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Mengambarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur daerah setelah diterapkannya Open Government Partnership.
3. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari adanya Open Government Partnership di Desa Pejambon

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan tambahan wawasan tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan inovasi kebijakan OGP, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Menjadi referensi bagi pihak lain yang tertarik dengan bidang penelitian yang sama
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah Desa Pejambon dalam mengevaluasi inovasi dalam kebijakan Open Government Partnership (OGP) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap

pembangunan Infrastruktur desa dan juga bisa bermanfaat bagi desa lain di Indonesia yang masih tertinggal untuk bisa menerapkan Inovasi Kebijakan Open Government Partnership.

Tinjauan Pustaka

a. Inovasi

Menurut Everett M. Rogers (dalam Suwarno, 2008:9) Inovasi adalah sebuah ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh satu unit adopsi lainnya. Selain itu, Rogers (dalam Suwarno 2008:17-18) juga menjelaskan bahwa secara umum inovasi mempunyai atribut diantaranya sebagai berikut :

1. *Relative Advantage* (Keunggulan Relatif)
Keunggulan dan nilai lebih adalah hal yang harus ada dalam suatu inovasi. Hal tersebut menjadi ciri khas dari inovasi. Selalu ada nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi dan hal itulah yang membedakannya dengan yang lain.
2. *Compatibility* (Kesesuaian)
Kompatibilitas inovasi merupakan kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman sebelumnya, dan kebutuhan dari yang akan menerapkan inovasi atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya.
3. *Complexity* atau Kompleksitas (Kerumitan)
Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.
3. *Triability* (Kemampuan di ujicobakan)
Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.
4. *Observability* (Kemudahan diamati)
Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

b. Pengertian Kebijakan

Kebijakan ada sebagai usaha pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu dalam masyarakat Menurut Parker (1975) yang dikutip oleh Wahab (2008:46), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.

c. Open Government Partnership

Open Government Partnership ini merupakan inisiatif multilateral yang bertujuan

untuk mewujudkan komitmen yang konkrit bagi pemerintah untuk mempromosikan keterbukaan, memberdayakan masyarakatnya, memberantas korupsi, serta memanfaatkan teknologi untuk pemerintahannya. Open Government Partnership (OGP) di luncurkan pada bulan 20 September 2011. Visi dari Open Government Partnership adalah mendorong banyak pemerintahan menjadi lebih transparan bukan hanya untuk saat ini tetapi juga berkelanjutan. Bukan hanya transparansi, tetapi Open Government Partnership juga mengupayakan akuntabilitas pemerintah.

Open Government Partnership berawal dari 8 negara yang menginisiasi yaitu Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2016, jumlah keseluruhan negara anggota yang bergabung dalam Open Government Partnership (OGP) ada 75 negara dan 15 pemerintah daerah, tetapi pada tahun 2019 negara anggota Open Government Partnership (OGP) telah bertambah menjadi 79 negara dan 20 pemerintah daerah. OGP bersandar pada empat nilai utama, yaitu :

- 1) Transparansi
- 2) Partisipasi Publik
- 3) Akuntabilitas
- 4) Inovasi teknologi informasi

d. Kemitraan (Partnership)

Menurut Sulistyani (2004:129) kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang tertentu sehingga memperoleh hasil yang baik. Ada tiga model kemitraan yang bisa menggambarkan hubungan organisasi menurut Sulistyani (2004:130), diantaranya adalah :

1. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu
Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak benar-benar melakukan kerjasama yang seimbang bahkan ada suatu pihak yang tidak belum tentu memahami secara betul akan tujuan dari kerjasama yang dilakukan. Terdapat sesuatu yang unik dari kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan serta manfaat apa yang didapatkan.
2. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik
Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu saling memberikan dan mendapatkan manfaat, sehingga bisa mencapai tujuannya.

3. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan Kemitraan konjugasi adalah kemitraan untuk mendapatkan energi kemudian terpisah satu sama lain. Dan selanjutnya melakukan pembelahan diri. Maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan suatu usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan model ini.

e. Pengertian partisipasi masyarakat

Menurut Theresia A, dkk (2014) dalam bukunya yang berjudul “pembangunan berbasis masyarakat” menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan kepedulian dan kesadaran masyarakat bahwa kegiatan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat pemerintah itu sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan dari masyarakat sebagai subyek yang di perbaiki mutu hidupnya.

f. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat

Menurut yadav dalam Theresia, *et al* (2014:198) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan terdiri dari :

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Pada partisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat melalui dibukanya forum-forum yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, gagasan atau pemikiran serta tanggapan maupun kritik terhadap program yang ditawarkan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan
Pada partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat secara sukarela menyumbangkan tenaga dalam kegiatan pembangunan. Selain itu partisipasi dalam pelaksanaan juga bisa dilakukan dengan pemeliharaan proyek-proyek pembangunan dalam masyarakat yang telah diselesaikan.
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan
Pada partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan menjadi unsur penting karena tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi pembangunan
Partisipasi dalam evaluasi ini diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan dan juga untuk mengetahui apakah program pembangunan telah tercapai atau belum.

g. Pengertian Pembangunan

Menurut Afiffudin (2015:42) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Administrasi Pembangunan”, hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat”.

h. Pengertian Infrastruktur

Pengertian infrastruktur menurut Grigg dalam Kodoatie (2005:8) merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dsb, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

i. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya (Adam Latif, Dkk, 2019).

j. Jenis Infrastruktur

Menurut Grigg dalam Kodoatie (2005:8) menjelaskan bahwa jenis infrastruktur dibagi menjadi 13 kategori antara lain :

1. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air (treatment plant),
2. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang,
3. Fasilitas pengelolaan limbah (padat),
4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, irigasi.
5. Fasilitas lintas air dan navigasi,
6. Fasilitas transportasi : jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya,
7. Sistem transit publik,
8. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi,
9. Fasilitas gas alam,
10. Gedung publik : sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, dll,
11. Fasilitas perumahan publik,
12. Taman kota: taman terbuka, plaza, dll, serta
13. Komunikasi

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiono (2013:9) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam dimana suatu data tersebut mengandung makna. Menurut Lexy. J. Moleong (2000:17), penelitian deskriptif adaah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian harus dilakukan pembatasan masalah agar peneliti lebih mudah dalam memilih data yang relevan dan data yang tidak akan digunakan dalam pembahasan, karena banyaknya data yang diperoleh. Fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pejambon dari adanya Open Government Partnership (OGP) :
 - a. Keterbukaan informasi
 - b. Kemitraan
 - c. Ruang partisipasi masyarakat
 - d. Pemanfaatan teknologi sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat
2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur desa setelah adanya inovasi kebijakan open government partnership (OGP) berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Yadav yaitu :
 - a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
 - b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
 - c. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan
 - d. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan
3. Pengaruh adanya inovasi kebijakan open government partnership (OGP) terhadap Desa Pejambon :
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa
 - b. Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Pejambon ini karena Desa Pejambon meraih Juara 1 Lomba Desa Open Government tahun 2016 tingkat Kabupaten Bojonegoro dan juga Juara 1 Lomba Desa Terinformatif tahun 2017 tingkat Jawa Timur.

Sumber Data

Data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini terdiri dari dua sumber :

1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta data hasil wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Daftar Informan penelitian :
 - Kepala Desa : Abd. Rokhman, S.Sos
 - Sekertaris Desa : Alvin Mujahid, S.Pd
 - Masyarakat Desa Pejambon :
 - Siti Nur H, Dusun Jambon RT 05 RW 01

- Prasetyo, Dusun Tanggungan RT.16 RW.02
- Darmaji, Dusun Jambon RT.08 RW.01
- Ahmad Basori, Dusun Tanggungan RT.16 RW.02
- Ngadenan, Dusun Jambon RT 07 RW 01
- Imam Masmud, Dusun Tanggungan RT.04 RW.01
- Musriyah, Dusun Jambon RT.09 RW.01

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti melalui sumber-sumber literatur seperti dokumen-dokumen serta laporan yang berkaitan dengan open government partnership (OGP) , penelitian terdahulu dan juga jurnal yang ada kaitannya dengan materi tentang inovasi kebijakan, open government partnership partisipasi masyarakat serta pembangunan infrastruktur desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Observasi
Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap suatu objek dalam lingkungan.
2. Wawancara
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang dirasa peneliti terlibat dalam lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dalam pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
3. Dokumentasi
Pada teknik pengumpulan data dokumentasi, peneliti akan mendokumentasikan gambar-gambar yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.
4. Studi Pustaka
Studi pustaka adalah salah satu teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan kepastakaan melalui buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal dan sumber lain yang dirasa relevan dengan materi yang digunakan oleh penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu :

- 1) Peneliti Sendiri
- 2) Pedoman wawancara
- 3) Catatan lapangan

4) Rekaman Wawancara

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data seperti yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2013:246) yaitu :

- 1) Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang dianggap penting untuk dimasukkan kedalam laporan hasil penelitian. Peneliti akan memilih data yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan dalam penelitian .
- 2) Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
- 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification)

Teknik Keabsahan Data

1. Triangulasi
Menurut Sugiyono (2013:273), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
2. Kecukupan Referensial
Memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.
3. Ketekunan Pengamatan

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Inovasi dari Kebijakan Open Government Partnership (OGP) di Desa Pejambon

Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejambon dari adanya kebijakan Open Government Partnership (OGP) bukanlah suatu hal yang murni dibuat oleh Pemerintah Desa Pejambon sendiri tetapi mengadopsi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. . Inovasi-inovasi tersebut diantaranya :

a. Keterbukaan Informasi

Pemerintah Desa Pejambon melakukan inovasi keterbukaan informasi agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap Pemerintah Desa Pejambon terkait penyelenggaraan pemerintahan. Dalam inovasi ini, informasi yang dipaparkan diberbagai media adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur, hasil dari kegiatan pembangunan infrastruktur, gaji kepala desa dan perangkat desa. Praktik dalam keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

Pejambon menggunakan berbagai media diantaranya:

- Media Luar Ruangan, Pemerintah Desa Pejambon membagi media luar ruangan menjadi tiga bentuk yaitu : Baliho, Poster, dan Papan Informasi di setiap RT
- Media Teknologi Informasi, Website Desa Pejambon adalah **pejambon-bjn.desa.id**.
- Media Tatap Muka , kegiatan “Jandom Bareng Kepala”.

Penulis menganalisis inovasi-inovasi dalam keterbukaan informasi dengan atribut inovasi menurut Rogers (dalam Suwarno, 2008:17-18) sebagai berikut

1. Relative Advantage (Keunggulan Relatif)

- Media Luar Ruangan
Keunggulan dari media ini adalah meminimalisir adanya korupsi yang ada di Desa Pejambon karena masyarakat bisa ikut memantau jalannya pengelolaan dana desa yang telah digunakan untuk membangun infrastruktur sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap Pemerintah Desa Pejambon dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dalam media ini mengumumkan informasi-informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa secara transparan yang dimuat dalam berbagai bentuk seperti baliho, poster dan papan informasi lingkungan RT.
- Media Teknologi Informasi (TI)
Media teknologi informasi disini adalah Website Desa. Keunggulan dari inovasi ini adalah keunggulan yaitu mempermudah seluruh masyarakat mengakses semua informasi tentang Desa Pejambon baik itu tentang pengelolaan anggaran, rencana pembangunan desa, profil desa, potensi desa, alokasi dana desa serta semua berita Desa Pejambon tanpa harus datang ke Kantor Desa karena lengkap tersedia di web desa.
- Media Tatap Muka
Media tatap muka disini adalah “Jandom Bareng Kepala Desa”. Keunggulan dari inovasi ini adalah masyarakat bisa mengetahui informasi yang tidak dapat dicari melalui media lain dalam keterbukaan informasi dengan menyampaikan pertanyaan maupun keluhan secara langsung kepada pemerintah Desa Pejambon melalui kegiatan jandom bareng dan juga hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi lebih dekat.

2. Compatibility (kesesuaian)

Menurut Rogers (dalam Suwarno, 2008:17-18), suatu inovasi harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan kebutuhan dari yang akan menerapkan inovasi. Seperti halnya dalam berbagai media dalam keterbukaan informasi diantaranya :

- **Media Luar Ruangan**
Kesesuaian inovasi ini dengan kebutuhan Desa Pejambon adalah inovasi ini bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat desa terhadap Pemerintah Desa Pejambon dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dengan adanya media luar ruangan masyarakat bisa mengawasi pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.
 - **Media Teknologi Informasi**
Kesesuaian inovasi ini dengan kebutuhan Desa Pejambon adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Pemerintah Desa Pejambon ingin agar masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dan inovasi ini bisa mewujudkannya.
 - **Media Tatap Muka**
Kesesuaian inovasi ini dengan kebutuhan Desa Pejambon adalah inovasi ini bisa mendekatkan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. Inilah yang dibutuhkan pemerintah Desa Pejambon karena dalam pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting.
3. **Complexity (kerumitan)**
Menurut Rogers (dalam Suwarno, 2008:17-18), inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang bisa jadi tinggi karena menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik. Tingkat kerumitan disini yang dimaksud adalah tingkat pemahaman dan penggunaan inovasi. Seperti halnya dalam berbagai media dalam keterbukaan informasi diantaranya :
- **Media Luar Ruangan**
Inovasi ini tidak terlalu rumit karena masyarakat pasti banyak yang bisa dengan mudah memahami karena informasi yang dipaparkan juga hanya terkait garis besar pengelolaan dana desa dan juga pembangunan infrastruktur, tetapi pemerintah juga harus teliti dalam menerapkan media ini. Selain itu biaya yang dibutuhkan tidak terlalu banyak,
 - **Media Teknologi Informasi**
Inovasi ini bisa dikatakan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi karena tidak semua orang bisa menggunakan internet, selain itu dibutuhkan biaya yang besar untuk membuat website desa juga membutuhkan

Sumber Daya Manusia yang memadai karena pemerintah desa harus mengupload setiap dokumen laporan-laporan penyelenggaraan desa diwebsite desa dan selalu mengupdate informasi yang ada dan hal ini membutuhkan keahlian.

- **Media Tatap Muka**
Inovasi ini bisa dikatakan sedikit rumit karena inovasi ini bisa berjalan jika ada partisipasi dari masyarakat karena untuk menggerakkan partisipasi masyarakat bisa terbilang cukup sulit, tetapi untuk biaya yang dibutuhkan dalam membuat inovasi ini tidak terlalu banyak,
4. **Triability (Kemampuan diuji cobakan)**
Menurut Rogers (dalam Suwarno, 2008:17-18), suatu inovasi bisa diterima apabila telah terbukti dan teruji mempunyai keuntungan atau nilai lebih. Seperti halnya inovasi dalam keterbukaan informasi melalui berbagai media yaitu media luar ruangan, media teknologi informasi, dan media tatap muka. Media-media tersebut sudah terbukti mempunyai keunggulan didalamnya sehingga inovasi tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Selain itu inovasi keterbukaan informasi juga sudah diujicoba oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakatnya sehingga Pemerintah Desa Pejambon juga melakukan hal tersebut. Tetapi media-media keterbukaan informasi yang dilakukan Pemerintah Desa dikemas sedikit berbeda dengan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. **Observability (Kemudahan diamati)**
Menurut Rogers (dalam Suwarno, 2008:17-18), suatu inovasi juga harus bisa diamati dari segi bagaimana inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Seperti halnya inovasi dalam keterbukaan informasi melalui berbagai media yaitu media luar ruangan, media teknologi informasi, dan media tatap muka. Pemerintah Desa Pejambon telah melihat hasil baik yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari keterbukaan informasi. Sehingga membuktikan inovasi ini mudah diamati
- b. **Kemitraan (Partnership)**
Pemerintah Desa Pejambon melakukan kemitraan dengan beberapa pihak diantaranya dengan Akademisi (Perguruan Tinggi), NGO (LSM) dan Government (Pemerintah). Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejambon dan Akademisi adalah dengan Universitas 17 Agustus Surabaya (UNTAG) dan juga Universitas Airlangga (UNAIR). Disini penulis menganalisis inovasi terkait kemitraan dengan teori atribut

inovasi menurut Rogers (dalam Suwarno 2008: 17-18) yaitu sebagai berikut:

- 1) **Relative Advantage (Keunggulan Relatif)**
Keunggulan dari inovasi ini adalah menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa, hal ini karena dengan adanya kemitraan dengan berbagai pihak berarti Pemerintah Desa Pejambon menyadari penting adanya partisipasi dari berbagai elemen-elemen dimasyarakat untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur desa.
- 2) **Compatibility (kesesuaian)**
Kesesuaian inovasi ini dengan kebutuhan Desa Pejambon adalah adanya keterlibatan elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa dan juga dalam kebijakan Open Government Partnership (OGP), kemitraan dengan berbagai pihak seperti LSM maupun komunitas dalam masyarakat. menjadi hal yang wajib dilakukan karena hal ini menjadi prinsip utama OGP
- 3) **Complexity (kerumitan)**
Tingkat kerumitan dalam inovasi ini cukup tinggi karena untuk melakukan kemitraan kedua belah pihak haruslah saling menguntungkan, sehingga untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain pemerintah desa pejambon juga harus bisa memberikan manfaat bagi partner kemitraannya.
- 4) **Triability (Kemampuan diuji cobakan)**
Inovasi ini terbukti mempunyai keunggulan dan juga telah dicoba oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan efektif oleh karenanya Pemerintah Desa Pejambon juga ikut menerapkan inovasi ini.
- 5) **Observability (Kemudahan diamati)**
Inovasi ini bisa diamati dari hasil kemitraan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejambon dengan beberapa pihak seperti dengan Bojonegoro Institute yang mempublikasikan banyak artikel online terkait informasi tentang Desa Pejambon dan juga adanya KKN (kuliah kerja nyata) dari UNAIR di Desa Pejambon.

c. **Ruang Partisipasi Masyarakat**

Pemerintah Desa Pejambon membuat ruang partisipasi untuk masyarakat desa agar bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di tingkat RT dan Program Basis Lingkungan, dimana dalam program ini dimana setiap RT diberikan anggaran untuk dikelola masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing lokasi. Penulis menganalisis inovasi ruang partisipasi masyarakat dengan atribut inovasi menurut Rogers (dalam Suwarno, 2008:17-18) yaitu sebagai berikut:

1. **Relative Advantage (Keunggulan Relatif)**
Keunggulan dari inovasi ini adalah pemerintah desabisa menggali lebih banyak aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunansehingga bisa dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan selain itu juga mendekatkan semua lapisan masyarakat dengan pemerintah desa, karena kegiatan musrenangdes ini di tingkat RT barulah ditingkat desa.
 2. **Compatibility (kesesuaian)**
Kesesuaian inovasi ini dengan kebutuhan Desa Pejambon adalah memberikan wadah partisipasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur baik dalam proses pengambilan keputusannya maupun dalam pelaksanaan pembangunannya.
 3. **Complexity (kerumitan)**
Tingkat kerumitan dalam inovasi ini adalah sedang karena inovasi ini tidak memerlukan alat maupun anggaran hanya membutuhkan hubungan yang baik antara pemerintah desa pejambon dengan masyarakat agar bisa terlaksana.
 4. **Triability (Kemampuan diuji cobakan)**
Inovasi ini terbukti mempunyai keunggulan dan juga inovasi ini murni hasil pemikiran Pemerintah Desa Pejambon. Sehingga belum pernah di uji cobakan dimana pun. Uji coba inovasi ini dilakukan sendiri oleh pemerintah desa pejambon selama 1 tahun.
 5. **Observability (Kemudahan diamati)**
Inovasi ini bisa diamati oleh semua masyarakat karena inovasi ini memang dibuat agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi-aspirasinya terkait perencanaan pembangunan sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Pejambon dalam melakukan pembangunan selanjutnya.
- d. **Pemanfaatan Teknologi sebagai Sarana Komunikasi dengan Masyarakat**
Pemerintah Desa Pejambon, mereka juga memanfaatkan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan pemerintah Desa Pejambon. Teknologi tersebut yaitu Nomor SMS center “*Hallo Desa*” dengan mengirimkan sms ke nomor 082298156979 dan Media Sosial mulai dari Facebook, Twitter, Youtube, Grup Whatsapp dan juga Instagram. . Penulis menganalisis inovasi pemanfaatan teknologi informasi dengan atribut inovasi menurut Rogers (dalam Suwarno, 2008:17:18) sebagai berikut:
- 1) **Relative Advantage (Keunggulan Relatif)**
Keuntungan dari inovasi ini adalah yaitu memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintah Desa Pejambon. Dengan

adanya SMS center dan juga media sosial masyarakat Desa Pejambon bisa menyampaikan keluhan-keluhan, aspirasi, kritik maupun saran hanya dengan melalui telepon seluler tanpa harus mendatangi kantor desa.

- 2) Compatibility (kesesuaian)
Kesesuaian inovasi ini dengan kebutuhan Desa Pejambon adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa Pejambon sebelumnya tidak memiliki sarana komunikasi dengan masyarakat
- 3) Complexity (kerumitan)
Tingkat kerumitan dalam inovasi ini masih sedang karena saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi banyak orang. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan masyarakat akan lebih mudah karena di era saat ini hampir semua orang bisa menggunakan handphone.
- 4) Triability (Kemampuan diuji cobakan)
Inovasi ini terbukti mempunyai keunggulan dan juga telah diuji cobakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro dan terbukti efektif. Sehingga Pemerintah Desa Pejambon juga memilih menerapkannya
- 5) Observability (Kemudahan diamati)
Inovasi ini bisa diamati oleh semua masyarakat karena masyarakat bisa mencoba berkomunikasi dengan Pemerintah Desa Pejambon melalui SMS Center desa maupun media sosial milik Desa Pejambon.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur setelah pelaksanaan OGP di Desa Pejambon

Kegiatan pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa saja tetapi juga masyarakat sekitar. Seperti penjelasan Theresia A, *et al* (2014) bahwa partisipasi masyarakat adalah perwujudan kepedulian dan kesadaran masyarakat bahwa kegiatan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat pemerintah itu sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat sebagai subyek yang diperbaiki mutu hidupnya. Sebelum adanya kebijakan Open Government Partnership (OGP), masyarakat Desa Pejambon tidak ada yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa.

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat Desa Pejambon adalah ikut serta dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam kegiatan ini masyarakat ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran

terkait usulan-usulan program pembangunan infrastruktur yang akan dibangun, kehadiran dalam rapat, serta ikut diskusi dan memberi tanggapan atau penolakan terhadap program-program yang telah diusulkan dalam kegiatan Musrenbangdes. Sesuai dengan pendapat Theresia, *et al* (2014) bahwa pada partisipasi pengambilan keputusan, masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat melalui dibukanya forum-forum yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, gagasan tanggapan maupun kritik terhadap program yang ditawarkan.

b) Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pejambon, masyarakat juga terlibat didalamnya. Partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam hal ini adalah dengan gotong royong menyumbangkan tenaga mereka untuk ikut serta dalam pembangunan dan memberikan kontribusi lainnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti kontribusi barang maupun makanan bagi tenaga kerja yang bertugas. Hal ini sesuai dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Yadav (dalam Theresia *et al*, 2014:198) yaitu partisipasi dalam pelaksanaan yang mana masyarakat secara sukarela menyumbangkan tenaga dalam kegiatan pembangunan.

c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi masyarakat yang dimaksud disini adalah keikutsertaan masyarakat dalam menerima manfaat dari hasil pembangunan infrastruktur dan juga cara masyarakat menjaga infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah Desa Pejambon serta kepedulian masyarakat dalam merawat/memelihara hasil pembangunan seperti jalan desa, tempat sampah, penerangan jalan umum (PJU), taman desa, sanitasi air, dan lain sebagainya untuk digunakan oleh masyarakat di Desa Pejambon.

d) Partisipasi dalam evaluasi pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan yang dimaksudkan disini adalah keikutsertaan masyarakat dalam peninjauan setiap hasil dari pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pejambon. Dalam kegiatan evaluasi pembangunan, pemerintah Desa Pejambon tidak melibatkan masyarakat didalamnya. Kegiatan evaluasi hanya dilakukan oleh kepala desa beserta perangkatnya serta lembaga desa. Sehingga tidak ada kegiatan evaluasi dengan masyarakat.

Pengaruh Adanya Inovasi Kebijakan Open Government Partnership (OGP) terhadap Desa Pejambon

a) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa

Adanya inovasi kebijakan Open Government Partnership (OGP) oleh Pemerintah Desa Pejambon memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam kegiatan pembangunan khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Peneliti menganalisis tingkat partisipasi masyarakat Desa Pejambon sesuai dengan bentuk partisipasi masyarakat menurut Yadav (dalam Theresia dkk, 2019:1). Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur bisa dikatakan baik. tngkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui kegiatan musrenbangdes bisa dikatakan cukup baik karena dari 7 warga Desa Pejambon yang telah diwawancarai 5 diantaranya ikut dalam kegiatan musrenbangdes walaupun 2 orang tidak ikut menyampaikan gagasannya, untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan bisa dikatakan baik karena dari 7 warga Desa Pejambon 5 diantaranya selalu ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga mereka melalui gotong royong dan juga memberikan kontribusi lainnya seperti material, makanan maupun rokok dan 2 orang lainnya jarang ikut. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur secara keseluruhan sudah baik tetapi masih harus ditingkatkan lagi.

b) Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga sekarang telah menghasilkan banyak infrastruktur bagi masyarakat Desa Pejambon. selama tahun 2016 Pemerintah Desa Pejambon telah berhasil melaksanakan delapan pembangunan infrastruktur yang mana infrastruktur tersebut termasuk kedalam jenis infrastruktur menurut Grigg dalam Kodoatie (2005:8) diantaranya adalah Pembangunan Saluran Pembuangan Air (SPA) Limbah yang termasuk sistem pengelolaan air limbah, Perbaikan dan perawatan jalan yang termasuk fasilitas transportasi, Pembangunan Gapura Desa, dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang termasuk kedalam sistem kelistrikan.

Pada tahun 2017 Pemerintah Desa Pejambon juga berhasil melaksanakan sebelas pembangunan infrastruktur, yang mana infrastruktur tersebut termasuk kedalam jenis infrastruktur menurut Grigg dalam Kodoatie (2005:8) diantaranya : Pembangunan Saluran Pembuangan Air (SPA) Lingkungan yang termasuk sistem pengelolaan air limbah, Perbaikan, Perawatan dan Pelebaran Jalan

yang termasuk fasilitas transportasi, Perawatan Gedung Polindes dan lantai kantor PKK yang termasuk gedung publik. Pemerintah Desa juga melakukan pembangunan tempat keranda kuburan dan juga pelebaran jalan disepanjang gapura desa hingga balai desa serta membuat pot bunga untuk diletakan di taman desa yang termasuk jenis infrastruktur taman kota.

Selama tahun 2018, ada dua belas kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Desa Pejambon, yang mana infrastruktur tersebut termasuk kedalam jenis infrastruktur menurut Grigg dalam Kodoatie (2005:8) diantaranya yaitu pembangunan dan perbaikan jalan yang termasuk fasilitas transportasi, Pembangunan Saluran Pembuangan Air (SPA) Lingkungan dan Gorong-gorong yang termasuk sistem pengelolaan air limbah, Pembangunan Gedung Paud, Balai Desa dan Taman Baca yang termasuk gedung publik, Perawatan Saluran Irigasi yang termasuk Fasilitas pengendalian banjir, dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang termasuk kedalam sistem kelistrikan.

Pada tahun 2019 Pemerintah Desa Pejambon juga berhasil melaksanakan delapan belas pembangunan infrastruktur, yang mana infrastruktur-infrastrukturu ini termasuk dalam jenis infrastruktur menurut Grigg dalam Kodoatie (2005:8) diantaranya : Pembangunan Kantor dan Balai Desa, Mushola Desa serta Perawatan Gedung Polindes dan lantai kantor PKK yang termasuk gedung publik. Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Rehab Jalan termasuk fasilitas transportasi, untuk Pembangunan Saluran Pembuangan Air (SPA) termasuk sistem pengelolaan air limbah, Pengurugan Alun-alun dan pengembangan taman Desa termasuk jenis infrastruktur taman kota. Pembangunan Sumur Bor dan Pompa Air yang termasuk sistem penyediaan air, Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang termasuk sistem kelistrikan.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti serta analisis yang telah diberikan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Inovasi dari kebijakan Open Government Partnership (OGP) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pejambon diantaranya : 1) Keterbukaan informasi, ada empat bentuk yaitu : Media Luar Ruangan, Media Teknologi Informasi, Media Tatap Muka, Pemasangan Display Layanan Informasi. 2) Kemitraan dengan Bojonegoro Institute (BI), Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, Universitas 17 Agustus Surabaya dan Universitas Airlangga. 3) Ruang partisipasi masyarakat yaitu Musrenbangdes dan Program Basis Lingkungan. 4) Pemanfaatan teknologi sebagai

- sarana komunikasi dengan masyarakat, yaitu SMS Center Desa serta media sosial facebook, instagram, twitter dan youtube Inovasi-inovasi tersebut sudah memenuhi atribut inovasi menurut Rogers (dalam Suwarno, 2008:17-18) yaitu aspek keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemampuan diujicobakan, dan kemudahan diamati.
2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Pejambon sudah sesuai dengan menurut yadav (A.Theressia *et al*, 2014:198) yaitu :
 - a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dengan ikut menjadi bagian dari kegiatan musrenbangdes.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan program basis lingkungan disetiap RT dengan gotong royong, memberikan kontribusinya berupa tenaga, material.
 - c. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dengan ikut menjaga hasil pembangunan infrastruktur
 - d. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil pembangunan, tidak ada partisipasi masyarakat didalamnya karena evaluasi ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan setiap akhir tahun
 3. Pengaruh adanya inovasi kebijakan Open Government Partnership (OGP) terhadap Desa Pejambon :
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur desa sudah baik, terutama partisipasi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.
 - b. Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur, semenjak adanya inovasi Open Government Partneship (OGP) banyak infrastruktur yang berhasil dibangun oleh Pemerintah Desa Pejambon diantaranya yaitu jenis infrastruktur : Sistem pengelolaan air limbah, Fasilitas transportasi, Sistem penyediaan air, Sistem kelistrikan, Gedung publik, Taman Kota.

Saran

1. Pemerintah Desa Pejambon seharusnya lebih banyak mengandeng komunitas- masyarakat yang ada di Desa Pejambon sehingga lebih mudah menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
2. Pemerintah Desa Pejambon perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa terkait Open Government Partneship (OGP) karena

masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan ini.

3. Pemerintah Desa Pejambon harus sering mengupdate informasi tentang kegiatan pembangunan mereka pada akun media sosial milik Desa, Pemerintah Desa jarang mengupdate informasi pada akun media sosial milik mereka baik itu facebook, twitter, maupun youtube, sehingga adanya akun media sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saat ini media sosial bisa menjadi sarana yang tepat untuk mengajak masyarakat Desa Pejambon untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur.
4. Pemerintah Desa Pejambon bisa membuat strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti membuat perdes baru dan juga melakukan inovasi lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin.2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Afifudin, 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan “ Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung : Alfabeta.
- Deputi Inovasi Administrasi Negara-LAN, 2016. Buku Seri Inovasi Administrasi Negara Seri 2 “*Pengembangan Model & Story Inovasi Tata Kelola Pemerintah & Pelayanan Publik*” Jakarta Pusat. publish Pusat INTAN-DIAN-LAN
- J.Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya:Bandung
- Kadji Yulianto,2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan “ Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*.Gorontalo : UNG Press Gorontalo
- Kodatie, Robert J. 2005 *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Deputi Inovasi Administrasi Negara, 2014. *Handbook Inovasi Administasi Negara* . Lembaga Adinistrasi Negara Pusat INTAN-DIAN-LAN
- Sugiyo, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*. Bandung : Alfabeta
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. STIA-LAN Press, Jakarta
- Theresia Aprilia dkk, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat “Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pegembangan Masyarakat”*. Bandung: Alfabeta

Jurnal

- Adam Latif, dkk, 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rinjang*

- Kabupaten Sindereng Rappang. Jurnal Moderat. Vol 5, No 1
- Mustikawati, 2016. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara”. E-journal Ilmu Administrasi Negara . Vol 4 No.2
- Anonim, 2015-2018,” *Profil Desa Pejambon*” <https://pejambon.co.id-profil-des> diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 17.08
- Kusnandaka Tjatur, Dinas Kominfo. “Menuju Gerbang Dunia Pemerintahan Terbuka RakyatBahagia” <http://repo.databojonegoro.com/Materi/OGP.pdf> diakses Pada pada 2
- PWYP Indonesia, 2017. *Resep Keterbukaan Ala Bojonegoro*. <https://pwypindonesia.org/id/resep-keterbukaan-ala-bojonegoro/> diakses pada 15 oktober 2019
- Pusdatin, 2012 “Open Government Indonesia” <http://dephub.go.id/post/read/open-government-indonesia-ogi-13385> diakses 28 September 2019 pukul 10.51
- [opengovbojonegoro.com/Pemerintah terbuka](http://opengovbojonegoro.com/Pemerintah_terbuka) diakses pada 17 November 2019 pukul 20.34

Lainnya

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro

Skripsi

- Zulkarnain M.F, 2017. “Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar”. Makassar : Universitas Hassanudin.